



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI  
RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2021-2022  
KE PROVINSI JAWA TIMUR**

\*

\*\*

\*\*\*

\*\*

\*

**JAKARTA 2021**



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI  
RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2021-2022  
KE PROVINSI JAWA TIMUR**

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR KUNJUNGAN KERJA**

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Timur merupakan respon Komisi IV DPR RI terhadap aspirasi beberapa *stakeholder* terkait dengan beberapa permasalahan dan usulan pengembangan di Kabupaten Blitar, Kediri, dan Surabaya Utara. Adapun Kunjungan Kerja Reses ini didasarkan pada:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
  - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
  - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 13 Juli 2021.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 18 Agustus 2021.

**B. RUANG LINGKUP**

Kunjungan Kerja Reses dilakukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPR RI dalam bentuk pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah dan permasalahan yang terjadi di daerah terkait dengan Pangan dan Pertanian, Kelautan dan Perikanan, serta Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Timur adalah untuk meninjau dan menerima aspirasi, baik dari petani, peternak, perusahaan swasta, mitra Komisi IV DPR RI, pembudi daya ikan, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dan Kediri.

### **D. SUSUNAN TIM**

Kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB), dengan susunan tim terlampir.

### **E. PELAKSANAAN KUNJUNGAN**

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada Masa Persidangan II Tahun 2021-2022 tanggal 17-21 Desember 2021 dan diselenggarakan di beberapa lokasi, diantaranya:

1. Kebun Cavendish di Ngaringan, Gandusari, Kabupaten Blitar;
2. Koperasi Petani Kec. Ponggok, Kabupaten Blitar (pengadaan pakan ternak jagung);
3. Republik Lele di Jl. Veteran Beringin, Kabupaten Kediri, Jawa Timur;
4. TPA Sekoto, Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur; serta
5. Gudang Perum Bulog Kancab Surabaya Utara.

## **II. GAMBARAN UMUM LOKASI KUNJUNGAN**

### **A. Kebun Cavendish di Ngaringan, Gandusari, Kabupaten Blitar**

Pengembangan pisang Cavendish di Kabupaten Blitar merupakan dukungan dari Pemerintah Daerah karena memiliki pasar yang potensial. Pada Tahun 2019, total produksi untuk pisang Cavendish di Jawa Timur mencapai 20 juta kuintal dengan luas panen 23 juta tanaman pisang dan berkontribusi 28,36% secara nasional. Prospek tanaman pisang Cavendish cukup baik, khususnya tanah di Kabupaten Blitar cukup bagus ditanami jenis tanaman apapun termasuk hortikultura. Disamping itu, penanaman jenis tanaman tersebut juga dipastikan tidak mengganggu komoditas lainnya.

Dalam upaya peningkatan perekonomian daerah, Kementerian Pertanian terus mendorong upaya pengembangan sentra kawasan pisang Cavendish di Kabupaten Blitar. Pengembangan hortikultura itu dilakukan karena pangsa pasar ekspor buah-buahan di dunia masih sangat terbuka, khususnya komoditas pisang yang sangat menjanjikan dan berpotensi ekspor khususnya diekspor ke Jepang.

Program pengembangan hortikultura berorientasi ekspor sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pemerataan ekonomi daerah. Tahun 2020 dan 2021 Kementerian Pertanian memrogramkan pengembangan sentra pisang Cavendish di Kabupaten seluas 50 hektar berada di Desa Kalimanis Kecamatan Doko 20 hektar, Desa Ampelgading Kecamatan Selorejo 20 hektar, dan Desa Selopuro Kecamatan Selopuro 10 hektar sudah memanen.

Kebun Cavendish di Kabupaten Blitar merupakan Kebun milik PT Nisantara Segar Abadi (NSA) yang merupakan anak perusahaan *Great Giant Pineapple* (GGP) yang berpusat di Lampung. PT NSA didirikan pada Tahun 2015 dan berperan sebagai pemasok SSN (PT Sewu Segar Nusantara). Luasan total yang ada di Kabupaten Blitar sebesar 300 Ha dengan komoditas utama yang dibudi daya adalah pisang dan nanas. PT NSA merupakan *offtaker* dan kelompok tani sebagai plasmanya. Petani akan mendapatkan pendampingan terkait budi daya tanaman pisang sehingga memenuhi kualitas ekspor. Disamping itu, Perusahaan juga akan membantu petani pisang untuk menjual hasil panennya.

Terkait dengan bibit pisang, perusahaan dan petani memperbanyak dengan sistem kultur jaringan. Usia tanaman pisang mulai dari penanaman hingga panen sekitar delapan bulan, sedangkan untuk nilai jual pisang juga lebih mahal ketimbang pisang jenis lainnya.

Pisang PT NSA dinilai lebih manis, aroma lebih kuat, lebih pulen, dan kandungan nutrisi lebih tinggi karena dihasilkan dari dataran tinggi sekitar 600-700 meter dari permukaan laut. Diversifikasi produk yang dilakukan Sunpride dengan menambah *value* dari produk yang sudah ada merupakan salah satu usaha yang bisa dilakukan brand dalam meningkatkan frekuensi pembelian produk oleh konsumen. Dengan menawarkan *value* yang lebih unggul, Highland Banana diyakini mampu meningkatkan basket size belanja konsumen kelas atas, khususnya di pasar modern.

## **B. Koperasi Petani Kec Ponggok, Kabupaten Blitar (pengadaan pakan ternak jagung)**

Sejak Oktober 2021, aksi protes peternak unggas terus berulang. Hal ini tidak lepas dari harga ayam hidup (*live bird*) dan telur ayam yang kerap anjlok di bawah biaya produksi. Berdasarkan informasi, harga *live bird* menyentuh Rp16.000,00-17.000,00/kg di tingkat peternak sejak September 2021. Sementara harga telur berkisar Rp14.000,00-17.000,00/kg, jauh di bawah acuan dalam Permendag Nomor 7 Tahun 2020 yang dipatok Rp19.000,00-21.000,00/kg. Penurunan yang terjadi diduga dikarenakan daya beli yang turun akibat PPKM di berbagai daerah, terutama Jawa dan Bali. Disamping itu, penurunan kondisi harga dipicu oleh *oversupply* yang masih terjadi. Terkait dengan permasalahan tersebut, Kementerian Pertanian selama ini sejauh ini masih mengandalkan kebijakan pengendalian di hulu dengan pengurangan populasi.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) terbaru oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Nomor 06066/PK.230/F/1021 yang dikeluarkan pada Oktober 2021, Pemerintah kembali meminta usaha perbibitan memangkas produksi bibit ayam (*cutting*).

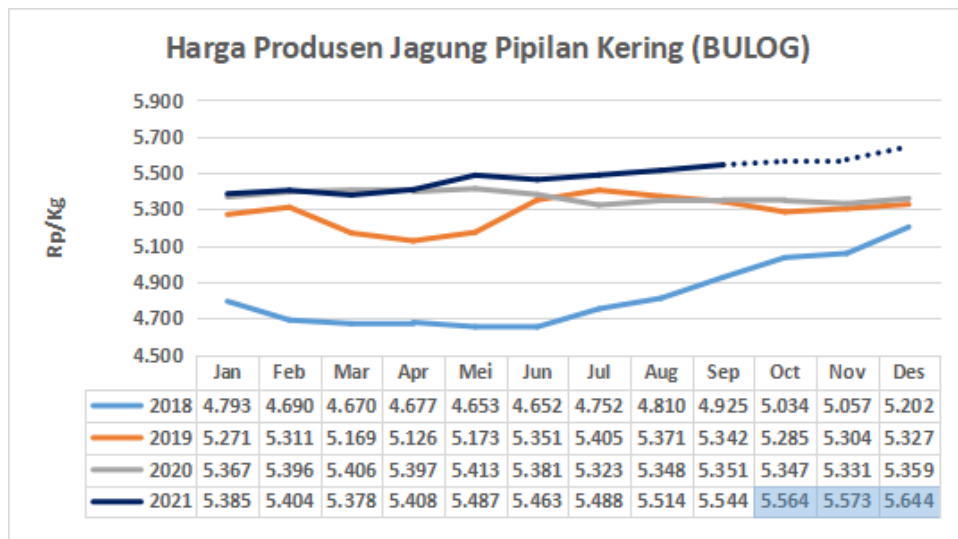
Hal yang sama terjadi pada komoditas telur ayam. Diindikasikan terjadi kelebihan pasokan karena beberapa perusahaan pemain besar berbudi daya ayam layer. Berdasarkan informasi, pelaku usaha integrasi telah menguasai ayam petelur hingga mencapai 15% secara nasional sehingga mengakibatkan harga telur anjlok sejak awal September 2021.

Presiden Jokowi telah memberikan solusi kepada peternak Blitar yang sempat melakukan aksi protes terkait dengan kondisi peternak saat ini. Presiden Jokowi telah menginstruksikan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk menurunkan harga pakan jagung peternak menjadi Rp4.500,00/kg yang semula Rp6.000,00/kg. Pemerintah akan memberikan pakan jagung dengan harga Rp4.500,00/kg sebanyak 30 ribu ton khusus untuk Koperasi Blitar.

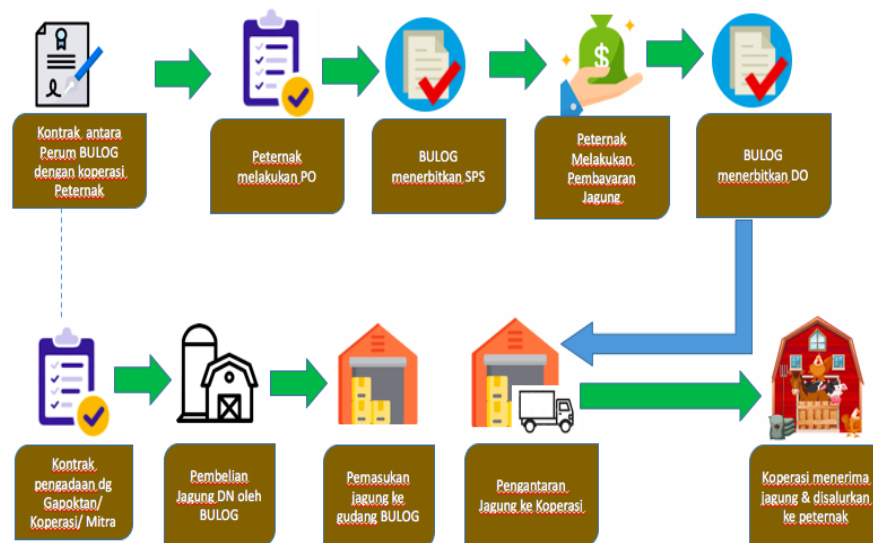
Penugasan diberikan seiring tingginya harga jagung pakan di pasaran yang membebani petani belakangan ini. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan Pemerintah telah melakukan rapat koordinasi terbatas untuk membahas mekanisme penugasan itu. Dalam

rapat pemerintah menyepakati bahwa mekanisme penugasan itu nantinya akan sama dengan intervensi pemerintah melalui Bulog dalam stabilisasi harga beras.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian BUMN menugaskan Perum Bulog untuk memasok 30 ribu ton jagung pakan kepada peternak rakyat dengan harga Rp4.500,00/kg sesuai dengan Harga Acuan Pemerintah (HAP). Jagung tersebut akan didistribusikan ke koperasi dan dijual seharga Rp4.500,00/kg kepada para peternak ayam petelur. Perum Bulog sendiri, membeli jagung di petani sesuai dengan harga di tingkat petani.



### SKEMA PENYEDIAAN DAN PENYALURAN JAGUNG DALAM NEGERI



### **C. Republik Lele di Jl. Veteran Beringin, Kabupaten Kediri, Jawa Timur**

Usaha budi daya ikan lele, di Republik Lele, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur menjadi salah satu contoh usaha yang berhasil menerapkan model bisnis budi daya yang berkelanjutan. Sejak berdiri pada Tahun 1985, Republik Lele telah memiliki kurang lebih 1.400 petak kolam yang berada di lahan budi daya dengan luas mencapai 3 Ha.

Republik Lele berkolaborasi dengan pemasok untuk pengadaan benih. Sejauh ini sudah ada sekitar 100 rekanan pembenih untuk suplai benih ke Republik Lele yaitu sebanyak 140.000 per hari. Pakan yang diberikan menggunakan pakan buatan yang telah terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Keberadaan Republik Lele sejauh ini telah membantu mendorong perputaran ekonomi di Kabupaten Kediri. Hal ini pun turut membuka lapangan kerja untuk masyarakat setempat. Selain itu, budi daya lele yang dilakukan Republik Lele bisa menjadi edukasi wisata karena masyarakat dapat datang berkunjung untuk belajar tentang budi daya ikan lele secara berkelanjutan.

### **D. TPA Sekoto, Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur**

Persoalan sampah menjadi problem di Kabupaten Kediri. Volume sampah yang dihasilkan setiap hari terus menumpuk dan mengakibatkan TPA mengalami *overload*. TPA yang ada di Desa Sekoto, Kecamatan Badas, setiap hari diperkirakan menampung 512 ton dengan sampah yang terkelola Kabupaten Kediri sekitar 23 persen, yang terdiri dari 17 persen penanganan, dan 6 persen pengurangan sampah.

Langkah tepat dan ketepatan waktu yang telah dilakukan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam pembangunan TPA Sampah Sekoto dengan menggunakan *Sanitary Landfill* (pengelolaan sampah melalui pemusnahan dengan cara menimbun), menjadi solusi penanganan persoalan sampah selama ini dikeluhkan oleh masyarakat.

Dengan adanya TPAS yang baru beroperasi dengan luas mencapai 525 ribu M<sup>3</sup>, diperkirakan mampu menampung sampah selama kurang lebih 5 tahun. Disamping itu, diperkirakan perluasan baru TPA yang terletak di Desa Sekoto, Kec. Badas, Kab. Kediri itu mampu menampung sampah 3.985 meter

kubik/hari dengan perkiraan sampah yang masuk ke TPA kurang lebih 515 meter kubik atau 12,9 persen sampah setiap harinya.

#### **E. Gudang Perum Bulog Kancab Surabaya Utara.**

Juli 2021, Perum Bulog Surabaya Utara telah mengoperasikan mesin giling *rice to rice* yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas beras yang ada di gudang Bulog Kecamatan Buduran. Sebagaimana fungsinya, mesin giling baru itu diperuntukkan meningkatkan kualitas beras yang masuk ke gudang. Selama ini mesin giling yang ada di Sidoarjo sebagian besar mesin giling kecil.

Diketahui mesin giling *rice to rice* itu merupakan yang pertama di Jawa Timur. Mekanismenya adalah dari beras yang dengan kualitas kurang bagus misalnya berdebu jika dimasukkan ke dalam mesin tersebut akan jadi lebih berkualitas.

### **III. HASIL KUNJUNGAN KERJA**

#### **A. Kebun Cavendish di Ngaringan, Gandusari, Kabupaten Blitar;**

PT NSA dengan perkebunan Cavendish berada di ketinggian 600 mdpl, sehingga produksinya disebut *Highland*. Pembibitan dilakukan sejak tahun 2015, penanaman pertama dilaksanakan pada Tahun 2016, dan panen perdana dilakukan pada November 2016. Luas lahan pembibitan mencapai 300 Ha, dimana 100 Ha digunakan untuk penanaman pohon pisang, buah-buah lain yaitu alpukat, durian, dan sukun seluas 15 Ha, Nanas seluas 8 Ha, dan beberapa jenis tanaman lainnya. Untuk proses tanam-panen membutuhkan waktu 10 bulan dan setiap hari dapat memanen 1000 pohon dengan produksi 22 ton. Pemasaran produk pisang Cavendish dipasarkan ke kota Jakarta, Surabaya, dan Bali. Produk PT NSA sangat berkualitas karena proses pembibitan, penanaman, hingga pemanenan semua dilaksanakan dalam kontrol dan kualitasnya sangat dijaga.

#### **Tanggapan PT NSA (PT GGF)**

PT NSA merupakan anak perusahaan dari PT *Great Giant Pineapple* Lampung. Tahun 2014 PT NSA memperoleh lahan di Kabupaten Blitar, Tahun 2016 sudah melakukan panen. 100 Ha ditanami ditanami pisang, selebihnya ditanami oleh komoditas pertanian lainnya. PT NSA juga menanam alpukat



seluas 10 Ha dengan pengembangan komoditas berasal dari perusahaan sendiri. Disamping itu juga terdapat lahan durian.

Saat ini PT NSA sudah menyerap 300 orang tenaga kerja dari desa sekitar dan satu-satunya perusahaan yang membayar tenaga kerjanya berdasarkan UMP. Di Kabupaten Blitar khusus memproduksi *Highland Banana* dan sebagian komoditas di ekspor ke Jepang dan Korea dengan merk Oriji.

Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, contohnya di Jakarta, PT NSA belum mampu memasok sesuai dengan kebutuhan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan, perusahaan tidak menambah luasan lahan tetapi mengembangkan *sharing value* dari hulu. Contohnya, untuk memenuhi Bali per minggu 5000 box, Perusahaan sudah bekerja sama dengan Pemprov Bali, untuk mengembangkan pisang. *Value* untuk petani Bali adalah keuntungan bisa memproduksi 5000 box per minggu. Pola kemitraannya dimulai dari pembibitan yang disediakan perusahaan serta pendampingan yang ditujukan agar bisa ekspor dan kualitas harus seragam.

**Usulan dari PT NSA: jika ingin melakukan ekspor ke Timur Tengah, untuk mengurangi cost, sebaiknya melalui Aceh dan perlu dikembangkan infrastrukturnya, khususnya pelabuhan.**

PT NSA tidak hanya memproduksi pisang Cavendish, tetapi juga pepaya (Timur Tengah kekurangan pepaya). Peluang ini dimanfaatkan perusahaan dengan melakukan ekstensifikasi yaitu bekerja sama dengan petani. Saat ini, kebijakan Pemerintah belum sinkron, contohnya: nanas dan pisang yang masuk ke Korea, biaya masuknya 30%, sedangkan pisang Vietnam hanya dikenakan 15% dan menurun dalam 5 tahun. Hal tersebut perlu diperhatikan. Kemudian, nanas kaleng masuk ke Eropa, biaya masuknya 16%, jika Filipina masuk ke Eropa biaya masuk 0%. Turki, biaya masuk untuk Indonesia hampir 40%, sedangkan Malaysia hanya 20%. Oleh karena itu, dibutuhkan perundingan antar negara terkait dengan permasalahan fiskal tersebut.

Selain itu, permasalahan ekspor juga disebabkan oleh kelangkaan kapal dan kontainer. 95% bisnis Ekspor Impor di Indonesia tidak ada satupun yang bermain di perkapalan (tidak seperti Singapura).

**Permasalahan utama adalah masalah perundingan fiskal, logistik, dan membuka pasar baru di Luar Negeri (nanas segar tidak bisa masuk ke China).**

#### **Tanggapan Petani Mitra Pisang PT NSA**

Petani sudah menanam 1600 pohon (terbagi 2 petani perintis) dan kemudian bermitra dengan PT NSA melalui Pemerintah Kabupaten Blitar. Petani yang bergabung sekitar 150 orang dengan penyebaran 7-11 km dari tempat pengiriman (*packing*). Angkutan yang dimiliki (yang ada di koperasi) masih sederhana (1 *pick up* dan roda tiga) dan bangunan *packing house*, dimana bangunan tersebut digunakan sebagai tempat penerimaan komoditas petani. Disamping itu, potensi pengembangan lahan masih cukup, selain lahan petani juga ada lahan perhutani yang bisa dimanfaatkan (dengan sistem kerja sama). Pola tanamnya, melibatkan petani dan menanamnya di bawah tegakan. Disamping itu, Petani meminta dukungan dibuatkan *packing house* pisang, pendampingan, dana, uppo, dan bantuan pupuk (karena sangat kesulitan pupuk dan cara pengadaannya sulit/keterbatasan dan dijatah).

#### **Tanggapan Komisi IV DPR RI**

Komisi IV DPR RI mengapresiasi kepada PT NSA yang tidak memperluas lahannya tetapi fokus bermitra dengan petani (*sharing value*). Pengembangan hortikultura yaitu pisang menjadi kebanggaan yang harus didukung dan kemitraan dengan petani harus ada kegiatan pembimbingan. Disamping itu, Komisi IV DPR RI meminta pelibatan Dinas dalam pengembangan pisang di Kabupaten Blitar.

#### **B. Koperasi Petani Kec Ponggok, Kabupaten Blitar (Pengadaan Pakan Ternak Jagung)**

Beberapa waktu yang lalu, kondisi peternakan ayam di Kabupaten Blitar mengalami fluktuatif harga dikarenakan kenaikan harga jagung sejak bulan Maret 2021 sampai dengan saat ini masih diatas HPP yaitu sekitar Rp5.000,00-Rp6.000,00/kg. Pemerintah sudah memberikan bantuan melalui Kementerian dan Perum Bulog sehingga ada subsidi jagung di Kabupaten Blitar dengan total 15 ribu ton dengan harga Rp4.500,00/kg walaupun kebutuhan jagung di

Kabupaten Blitar untuk para peternak dalam sehari membutuhkan kurang lebih 1000-1200 ton per hari.

Disamping itu, harga telur di Kabupaten Blitar selama 3 bulan terakhir masih cukup rendah bahkan pernah mencapai Rp12.000,00-Rp13.000,00/kg. Seminggu terakhir ini, harga telur naik dengan harga Rp21.200,00-Rp22.000,00/kg. Peternak ayam di Kabupaten Blitar terdapat 4300 peternak (data Tahun 2013) dan mengalami penurunan (per Desember 2021) menjadi 3900 peternak. Hal tersebut mempengaruhi produk Kabupaten Blitar dikarenakan sebelumnya dapat memproduksi 1200 ton per hari, saat ini ini hanya memproduksi 800 ton. Kabupaten Blitar dulu bisa men-*supply* 28% kebutuhan nasional diharapkan bisa bertahan dengan dukungan Komisi IV DPR RI.

### **Tanggapan Koperasi Putra Blitar dan Peternak Unggas**

Blitar mendapatkan kuota jagung dari Pemerintah dan sudah terealisasi 9259 ton dan sisanya sekitar 5000 ton. Terdapat asosiasi, koperasi, peternak mandiri, yang seluruhnya diakomodir oleh Koperasi Putra Blitar untuk mendapatkan pakan jagung dengan catatan harus mengisi berita acara/surat agar pakan jagung tidak diperjualbelikan dan khusus untuk peternak Blitar (ada SOP). Proses pengajuan jagung dari peternak, disetujui oleh asosiasi dan kemudian diserahkan kepada Koperasi Putra Blitar. Setelah itu, Koperasi akan membuat PO yang dikirimkan ke Perum Bulog dan langsung diverifikasi untuk mendapatkan SPS (Surat Perintah Setor) yang langsung diserahkan kepada peternak unggas yang mengajukan dan segera membayar kepada Koperasi Putra Blitar agar Perum Bulog segera mengirimkan pakan jagung.

**Namun dalam pengaplikasiannya mengalami kendala dimana penebusan SPS dengan jagung rentannya terlalu lama sehingga peternak unggas mengeluhkan karena jagung belum tersedia.** Koperasi masih baru berdiri sehingga tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan peternak. Koperasi telah mengajukan pinjaman ke LPDB tidak kunjung turun sejak Tahun 2019/2020 karena LPDB meminta jaminan yang tidak bisa dicukupi oleh Koperasi. **Meminta dukungan Komisi IV DPR RI untuk menghimbau kepada Kementerian Koperasi agar LPDB yang diajukan bisa dicairkan.**

Koperasi Putra Blitar saat ini bekerja sama dengan *FoodStation* terkait dengan pengadaan telur dan kerjasama dengan Tasikmalaya untuk pengiriman telur sebagai bansos.

**Diharapkan penanaman jagung ke depan luasannya diperlebar atau ditambah khususnya di luar pulau karena masih banyak yang kosong. Disamping itu, menugaskan Perum Bulog untuk menyerap jagung saat panen raya yang ketersediaannya digunakan untuk *buffer stock* dan ketika paceklik, stok jagung dapat dikeluarkan kepada peternak UMKM.**

Terkait masalah telur yang harganya fluktuatif, **masyarakat meminta dukungan dari Komisi IV DPR RI agar Pemerintah membantu peternak dengan menyerap telur melalui bansos.** Masyarakat telah mengusulkan kepada Menteri Sosial namun bansos bukan wewenang, karena wewenang PMK. Disamping itu, bansos diharapkan jangan diberikan sekaligus.

Dinas Peternakan tidak menyediakan Lab yang memadai sehingga pakan yang akan diuji prosesnya sangat panjang. Saat ini peternak ayam sudah berkurang 40% dan sebagian beralih ke peternak kambing, sapi, ayam jopper, itik, peternak tersebut menggunakan bahan pakan bersumber dari limbah mie, roti, sawit, dsb dan di Lab-kan ke Dinas Pertanian. **Oleh karena itu, meminta dukungan dari Komisi IV DPR RI dan Pemerintah untuk menambah Lab Kabupaten Blitar (contohnya lab asam amino, energi, dll).**

Peternak mengalami masalah tahun 2015 karena adanya UU Nomor 18 Tahun 2009, dimana integrator/pabrik diperbolehkan budi daya, setelah itu peternak rakyat terjadi masalah (harga telur mengalami permasalahan) karena pabrik juga memproduksi telur. Oleh karena itu, **meminta dukungan dari Komisi IV DPR RI untuk semua peternak di seluruh Indonesia agar budi daya ternak dikembalikan kepada rakyat sedangkan pabrik hanya mengurus pakan dan DOC.**

Populasi ayam di Kabupaten Blitar semakin menurun karena banyak peternak yang tutup kandang. Disamping itu, beberapa tahun terakhir ketika harga telur naik, Pemerintah memiliki mekanisme agar harga telur tidak naik dengan cara operasi pasar, gerakan pertanian, dll. Tetapi ketika harga telur turun, tidak ada mekanisme legal yang dilakukan untuk menahan harga agar tidak turun terus. Sehingga **Peternak mengusulkan agar menerbitkan Perpres atau Keppres yang melindungi peternak UMKM, stop budi daya**

**unggas oleh integrator dan kembalikan budi daya unggas kepada rakyat, serta stabilkan harga telur dan pakan.**

**Peternak ingin adanya stabilisasi cadangan harga per tahun dan Komisi IV DPR RI harus mengawal serta Kemenko menugaskan Perum Bulog untuk menyetabilkan harga pakan. Pakan yang digunakan oleh peternak unggas 50% menggunakan komoditas jagung, jagung sangat dibutuhkan dengan harga yang stabil seluruh Indonesia. Disamping itu, harga jagung minimal di HPP telur. Hari ini, HPP Rp21.000,00/kg dan jika harga telur di Jakarta mencapai Rp21.000,00-25.000,00/kg, maka Peternak mengalami kerugian sebesar Rp5.000,00-7.000,00/kg di kandang.**

### **Tanggapan Kementerian Pertanian**

Terkait dengan stok jagung, sesuai dengan arahan Menteri Pertanian bahwa agar menyiapkan jagung di sekitar Kabupate Blitar (disiapkan 2 kali lipat) dan diharapkan agar tidak terus berulang. Kementerian Pertanian juga akan segera memetakan daerah-daerah yang membutuhkan jagung di sekitar Kabupaten Blitar sehingga kebutuhan jagung dapat disiapkan dengan segera.

Kementerian Pertanian telah menyerap 1 juta telur, dan terkait dengan UU Nomor 18 Tahun 2009 akan menjadi catatan Kementerian Pertanian. Diharapkan ada sinergi antara integrator dan peternak rakyat agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Terkait dengan komposisi pakan, diharapkan Kabupaten Blitar ada pabrik pakan sehingga tidak tergantung dari yang ada dan akan didorong ke Ditjen PKH.

Terkait dengan Lab, Ditjen PKH membangun Lab pakan (terkait dengan keamanan dan mutu pakan nasional) ada di Bekasi dan membina setiap Provinsi. Untuk membangun Lab membutuhkan dana yang besar dan untuk tingkat kabupaten baru ada di Kabupaten Blitar. Lab pakan bukan untuk melayani peternak karena Lab dibangun untuk menguji pabrik pakan agar pakan yang dikeluarkan sesuai dengan keamanan dan mutu pakan (wajib). Oleh karena itu, peternak bisa mengirim ke Jawa Timur atau ke wilayah lainnya.

### **Tanggapan Perum Bulog**

Terkait dengan penugasan dari Pemerintah untuk Perum Bulog dalam penyerapan dan pengadaan pakan jagung. Dari kuota penugasan dari Pemerintah sebesar 30 ribu ton, saat ini Perum Bulog sudah menyalurkan

sebanyak 19 ribu ton dan ditargetkan hingga akhir tahun 2021 akan selesai disalurkan. Khusus untuk Kabupaten Blitar, total Perum Bulog menyalurkan ke Koperasi sebanyak 15 ribu ton dan sudah menyalurkan sebesar 10 ribu ton.

Terkait dengan keterlambatan pengiriman, Perum Bulog menyikapi bahwa ada kendala sehingga memberikan kesempatan kepada peternak untuk mengambil secara curah. Jika Perum Bulog lambat, Peternak dipersilahkan untuk mengambil ke supplier Perum Bulog dan ongkos angkut akan diganti oleh Perum Bulog.

### **Tanggapan Komisi IV DPR RI**

Komisi IV DPR RI mengharapkan Perum Bulog dapat segera menyalurkan seluruh pakan jagung hingga Desember 2021. Disamping itu, Komisi IV DPR RI sangat mendukung jika telur dijadikan komoditas yang dimasukkan ke dalam bantuan sosial. Komisi IV DPR RI sering menyuarakan ketika harga telur sangat rendah dan Presiden juga meminta agar komoditas telur dijadikan salah satu komoditas bantuan sosial.

Kearifan lokal sangat penting digunakan dan masyarakat seharusnya diberikan komoditas yang bisa mendukung nutrisi masyarakat (menghindari stunting). Komisi IV DPR RI juga meminta kepada Kementerian Pertanian untuk *men-follow up* kebutuhan Lab yang ada di Dinas Pertanian (untuk pakan).

Jagung di Blitar sangat penting dan krusial untuk pakan. Beberapa waktu yang lalu juga menyatakan bahwa ketersediaan jagung sangat cukup tapi lokasinya sangat jauh sehingga harus ada solusi bersama dengan petani jagung.

### **C. Republik Lele di Jl. Veteran Beringin, Kabupaten Kediri, Jawa Timur**

Produksi Lele di Kabupaten Kediri saat ini mencapai 1600 ton/tahun dengan omset kurang lebih mencapai 1,6 triliun sedangkan untuk produksi benih lele mencapai 13,3 Miliar per tahun. Republik Lele merupakan salah satu pembudi daya lele terbesar di Jawa Timur sejak 1985 dan mampu *men-supply* sebagian besar kebutuhan lele di Provinsi Jawa Timur.

Republik lele memiliki 1.400 kolam budi daya dengan produksi per hari sekitar 10 ton. Penyediaan benih lele di Republik Lele dilakukan dengan pola kerja sama dengan 100 masyarakat daerah penyedia benih lele, dan untuk pakan lele diperoleh dari penyedia pakan sekitar.

Dalam mempertahankan produksinya, Kabupaten Kediri sudah mulai mengembangkan produksi lele ke dalam bentuk olahan seperti bakso lele, keripik lele, dan produk turunan lainnya, serta mengembangkan wisata budi daya lele.

Pada masa pandemi Covid-19, Republik lele mengalami permasalahan yaitu harga pakan yang terus meningkat. Disamping itu, pendapatan semakin menurun (sekitar 5%-7%) sehingga Pembudi daya lele **meminta dukungan dari Komisi IV DPR RI agar Pemerintah dapat menyediakan sarana pembuatan pakan mandiri.**

#### **Tanggapan dari Komisi IV DPR RI**

Komisi IV DPR RI mengapresiasi keberhasilan yang telah dicapai oleh Republik Lele dalam melakukan budi daya lele. Disamping itu, Komisi juga mengapresiasi pola kemitraan yang telah dikembangkan oleh Republik Lele dengan masyarakat pembudi daya di Kabupaten Kediri sehingga dapat membantu masyarakat sekitar untuk meningkatkan perekonomiannya dan tidak mematikan pembudi daya kecil.

Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk bisa memperhatikan Republik Lele dan menjadikannya sebagai contoh budi daya sektor perikanan sehingga dapat diterapkan di daerah-daerah lain dan meniru pola yang dikembangkan oleh Republik Lele. Untuk mendukung keberlangsungan Republik Lele yang ada di Kabupaten Kediri, Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera mengembangkan pakan mandiri bagi masyarakat pembudi daya dan mempermudah penerbitan sertifikat pakan mandiri yang pakannya diproduksi oleh pembudi daya.

#### **D. TPA Sekoto, Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur**

Berdasarkan data yang diperoleh pada Tahun 2020, Kabupaten Kediri memproduksi sampah sekitar 508,68 ton/hari dengan 22,4% atau sekitar 113,93 ton/hari sampah yang dapat dikelola dan sisanya sebesar 77,7% atau sekitar 394,75 ton/hari tidak mampu dikelola dengan baik. Kabupaten Blitar semenjak 2019 belum mendapatkan dukungan bantuan sarana prasarana

(motor roda tiga) dari Pemerintah Pusat dalam rangka mengangkut sampah di masyarakat.

TPA Sekoto Kabupaten Kediri saat ini memiliki 8 unit Bank Sampah, 4 unit TPS 3R, 15 Unit pengepul/lapak, dan 1 unit TPA. Untuk TPA Sekoto Kabupaten Kediri, sistem operasional yang dilakukan adalah *open dumping* (berdasarkan pemantauan Adipura Tahun 2019) dengan jumlah total sampah yang masuk ke TPA sebesar 81,98 ton/hari (Berdasarkan Data Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Kediri Tahun 2020 yang disampaikan melalui SIPSN). Berikut ini adalah tabel fasilitas pengelolaan sampah TPA Sekoto Kabupaten Kediri dan Kondisi TPA Sekoto Kabupaten Kediri.

#### Fasilitas Pengelolaan Sampah di TPA Sekoto Kabupaten Kediri

No.	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit	Sampah Terkelola (ton/hari)
1	Bank Sampah Unit	8	0.045
2	TPS 3R	4	2.57
3	Pengepul/lapak	15	27.23
4	TPA	1	81.98

#### Kondisi TPA Sekoto Kabupaten Kediri

KONDISI TPA		KETERANGAN
Sistem Operasional	<i>Open Dumping</i>	Berdasarkan Pemantauan Adipura Tahun 2019
Jumlah Total Sampah yang Masuk ke TPA	81.98 ton/hari	Berdasarkan Data Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Kediri Tahun 2020 yang disampaikan melalui SIPSN
Jumlah Sampah yang Dikumpulkan Pemulung dan menjadi bahan baku kompos	2.59 ton/hari	
Jumlah yang Masuk ke Landfill	79.39 ton/hari	

Saat ini, TPA Sekoto telah diperbaharui dengan menggunakan anggaran Kementerian PUPR Tahun 2020 dan saat ini masih dilakukan proses pendampingan operasional. TPA Sekoto yang telah baru memiliki luas 4,5 Ha,



luas *landfill* 1,8 Ha, luas instalasi pengolahan lindi 0,5 Ha, dan memiliki 3 alat berat (*excavator, loader dan bulldozer*) yang kondisinya masih baik.

### **Tanggapan dari Komisi IV DPR RI**

Berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan oleh Komisi IV DPR RI ke TPA Sekoto Kabupaten Kediri, Komisi IV DPR RI mendorong KLHK untuk menjadikan TPA Sekoto sebagai proyek percontohan pengelolaan sampah kolaboratif antara masyarakat, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah. Pengelolaan dengan sistem kolaboratif diharapkan dapat diwujudkan sejak Tahun 2022.

Komisi IV DPR RI juga meminta kepada KLHK untuk memperkuat pola kemitraan dengan menjadikan sampah sebagai nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar TPA. Contohnya dengan memperbolehkan masyarakat sekitar TPA untuk mengolah sampah-sampah plastik sebagai kompensasi karena wilayahnya digunakan untuk pembangunan TPA Sekoto. Hal tersebut dapat dilihat dari TPA Kabupaten Mojokerto yang dapat melakukan kemitraan dengan masyarakat dan pengelolaan sampah dilakukan dengan sistem kolaboratif.

### **E. Gudang Perum Bulog Kancab Surabaya Utara**

MRMP yang dimiliki oleh Perum Bulog masih dalam tahap pembangunan. Diperkirakan MRMP akan ada di 3 lokasi yaitu di Subang, Kendal, dan Sragen dengan pembiayaan berasal dari PMN. Saat ini Perum Bulog membangun infrastruktur dimana MRMP dibangun di 10 lokasi dengan nilai 14 miliar per 1 lokasi (*Rice to Rice, Gudang Modern, dan Gudang Komoditas yang semuanya hanya menginvestasikan mesin dan memanfaatkan gudang lama*). Di dalam MRMP, beras lama dan baru bisa di-reproses.

Stok beras Perum Bulog di provinsi Jawa Timur saat ini mencapai 85 ribu ton dengan kebutuhan rata-rata per bulan untuk masyarakat Jawa Timur sebesar 40 ribu ton sehingga stok untuk Provinsi Jawa Timur cukup 4-5 bulan (aman). Khusus untuk cabang Surabaya Utara, stok beras mencapai 32 ribu ton dengan kebutuhan yang relatif kecil yaitu 1-2 ribu ton. Infrastruktur yang Perum Bulog bangun berdasarkan dari tambahan PMN (Tahun 2016 sebesar 2 Triliun masih mengalami kendala dalam perjalanannya). Selama 5 tahun yang terkontrak baru Rp1,4 triliun, masih ada beberapa proyek yang akan

dibangun baik untuk MRMP (3 lokasi, Makassar, Cirebon, Grobogan), beberapa titik R2R, maupun gudang komoditas pangan maupun gudang modern (rencana dibangun di Makassar).

Salah satu R2R di Surabaya Utara baru selesai dibangun Tahun 2021 dengan kapasitas produksi 6 ton/jam dan dioperasikan 8-10 jam per hari (masih kebutuhan internal Perum Bulog). Beberapa beras yang masuk diantaranya beras pecah kulit yang perlu di-reproses dan dijadikan beras medium. Disamping itu, R2R ini digunakan untuk memproses beras mitra dan beras lama yang merupakan stok CBP dengan umur tua (pengadaan Tahun 2018). **Perum Bulog meminta dukungan Komisi IV DPR RI terkait dengan hilirisasi komoditas Perum Bulog.**

Perum Bulog tidak ada kendala untuk menyerap beras petani dengan pemenuhan setiap tahun 1-1,5 juta ton, namun tidak maksimal mengadakan pengadaan beras dari petani. Hal ini dikarenakan setiap musim panen, petani mengharapkan membeli, Perum Bulog tidak bisa leluasa karena akan membebani anggaran yang anggarannya berasal dari dana komersil (pinjaman dana perbankan). Secara finansial, kondisi keuangan Perum Bulog setiap tahun laporan keuangan masih negatif hanya saja selama 3 tahun terakhir, Tahun 2019 kerugian Perum Bulog Rp1,7 triliun, Tahun 2020, kerugian Perum Bulog Rp800 miliar, dan diharapkan Tahun 2021 kerugian Perum Bulog semakin menurun (diharapkan hingga mencapai 350 Miliar). Hanya saja, **beban bunga dari dana komersil perbankan yang digunakan untuk pengadaan beras petani, rata-rata Perum Bulog membayar bunga sekitar Rp1,2-Rp1,3 triliun per tahun.** Jika Perum Bulog mendapatkan penyaluran atau Perum Bulog mendapatkan anggaran dari Pemerintah dalam pengadaan beras/gabah petani, secara finansial Perum Bulog akan mengalami keuntungan karena sebelum dikurangi oleh beban bunga dan pajak, keuntungan Perum Bulog mencapai Rp1,1-Rp1,2 triliun. Diharapkan dukungan dari Komisi IV DPR RI untuk penyaluran CBP akan membantu Perum Bulog dalam menekan cost dari Perum Bulog.

#### **Tanggapan dari Komisi IV DPR RI**

Saat ini peran Perum Bulog terbagi menjadi dua yaitu dari sisi komersil dan berperan menjadi fungsi publik di bawah Pemerintah. Kondisi Perum Bulog

saat ini sangat berbeda jauh karena sebelumnya Perum Bulog mendapatkan dorongan dari APBN, sedangkan saat ini hanya mengandalkan dari kredit komersial. Perum Bulog hanya mampu menyerap gabah petani sekitar 5-7%, karena tidak didukung anggaran dari Pemerintah dan hanya mengandalkan anggaran komersial.

Komisi IV DPR RI diharapkan dapat memberikan arahan strategis, yang dapat menguntungkan Perum Bulog serta petani nasional. MRMP yang dibangun oleh Perum Bulog diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beras petani.

Komisi IV DPR RI akan mendorong Pemerintah terkait dengan dana yang belum dicairkan, agar segera dicairkan sesuai dengan komitmen yang telah diputuskan di Badan Anggaran DPR RI (Rp2,2 triliun). Disamping itu, dibutuhkan reformasi dan diharapkan dengan adanya Badan Pangan Nasional, fungsi Perum Bulog dapat diperkuat dan dikembalikan sesuai dengan fungsinya sebagai pelindung harga komoditas petani.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Komisi IV DPR RI mengapresiasi kepada PT NSA untuk tidak memperluas lahannya dan lebih fokus bermitra dengan petani (*sharing value*);
2. Komisi IV DPR RI mengharapkan Perum Bulog dapat segera menyalurkan seluruh pakan jagung hingga Desember 2021;
3. Komisi IV DPR RI sangat mendukung jika telur dijadikan komoditas yang dimasukkan ke dalam bantuan sosial. Komisi IV DPR RI sering menyuarakan ketika harga telur sangat rendah dan Presiden juga meminta agar komoditas telur dijadikan salah satu komoditas bantuan sosial;
4. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberi perhatian kepada Republik Lele dan menjadikannya sebagai contoh budi daya sektor perikanan sehingga dapat diterapkan di daerah-daerah lain dan meniru pola yang dikembangkan oleh Republik Lele;
5. Untuk mendukung keberlangsungan Republik Lele yang ada di Kabupaten Kediri, Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera mengembangkan pakan mandiri bagi masyarakat

- pembudi daya dan mempermudah penerbitan sertifikat pakan mandiri yang pakannya diproduksi oleh pembudi daya;
6. Komisi IV DPR RI mendorong KLHK untuk menjadikan TPA Sekoto sebagai proyek percontohan pengelolaan sampah kolaboratif antara masyarakat, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah. Pengelolaan dengan sistem kolaboratif diharapkan dapat diwujudkan sejak Tahun 2022;
  7. Komisi IV DPR RI juga meminta kepada KLHK untuk memperkuat pola kemitraan dengan menjadikan sampah sebagai nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar TPA;
  8. Komisi IV DPR RI diharapkan dapat memberikan arahan strategis, yang dapat menguntungkan Perum Bulog serta petani nasional; serta
  9. Dibutuhkan reformasi dan diharapkan dengan adanya Badan Pangan Nasional, fungsi Perum Bulog dapat diperkuat dan dikembalikan sesuai dengan fungsinya sebagai pelindung harga komoditas petani.

## V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, dan Surabaya Utara Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan temuan, aspirasi, permasalahan, dan informasi yang diperoleh, Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti hal tersebut dalam rapat dengan mitra kerja Komisi IV DPR RI terkait. Kami berharap Kunjungan Kerja Reses ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Jakarta, Desember 2021

Ketua Tim,

Ttd.

**Anggia Erma Rini, MKM**

A-41

## LAMPIRAN MEDIA CETAK

### Komisi IV DPR RI Lakukan Kunjungan Kerja ke PT Nusantara Segar Abadi

FAJARBANTEN.COM - Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini melakukan kunjungan ke PT Nusantara Segar Abadi, di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Jumat 17 Desember 2021

Kunjungan terkait dengan dukungan untuk pengembangan hortikultura unggulan kabupaten setempat, yaitu Pisang Cavendish. Kabupaten Blitar sangat berpotensi untuk dilakukan pengembangan pisang jenis tersebut karena kondisi tanahnya mendukung untuk ditanami jenis tanaman apapun, termasuk hortikultura

“Pisang khas Blitar ini memiliki kualitas pisang yang jauh lebih baik dibandingkan daerah lainnya,” ujar Anggia

Ke depannya, Komisi IV DPR RI berharap pisang produksi lokal kualitas internasional ini dapat terus optimalkan pasar luar negeri, khususnya ekspor ke Arab Saudi. Karena tahun 2019, total produksi Pisang Cavendish di Provinsi Jawa Timur capai 20 juta kuintal dengan kontribusi nasional sebesar 28,36 persen. (Dede).

**Sumber:** <https://www.fajARBanten.com/news/pr-1332189525/komisi-iv-dpr-ri-lakukan-kunjungan-kerja-ke-pt-nusantara-segar-abadi>

### Sumber lainnya:

1. <https://www.lensaindonesia.com/2021/12/21/serap-informasi-dari-peternak-komisi-iv-dpr-ri-kunjungi-pembudidaya-lele-kabupaten-kediri.html>
2. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36579/t/Tingkatkan+Ekspor+Pisang+Blitar+Melalui+Kolaborasi+Swasta>
3. <https://jayatikediri.jurnalisindonesia.id/read/41812/Bupati-Blitar-Dampingi-Kunjungan-Kerja-Wakil-Ketua-Komisi-IV-DPR-RI-Bertemu-Petani-dan-Peternak>
4. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36607/t/Izin+Rantai+Ekspor+Produk+Hortikultura+ke+Mancanegara+Perlu+Dipermudah>
5. <https://www.niaga.asia/izin-rantai-ekspor-produk-hortikultura-ke-mancanegara-perlu-dipermudah/>
6. <https://www.radarbogor.id/2021/12/18/endang-s-thohari-minta-semua-stakeholder-berkontribusi-aktif-memperkuat-petani-dan-peternak-lokal-di-jawa-timur/>
7. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36584/t/Komisi+IV+Minta+Bulog+Intervensi+Pasar+Tekan+Harga+Jagung+di+Blitar+>
8. <https://www.lensaindonesia.com/2021/12/20/pantau-kenaikan-harga-jagung-dari-hulu-hingga-hilir-komisi-iv-dpr-ri-kunjungi-petani-blitar.html>

9. <https://www.realitarakyat.com/2021/12/lewat-kolaborasi-swasta-dpr-dukung-tingkatkan-ekspor-pisang-blitar/>
10. <https://koran-jakarta.com/bulog-diminta-intervensi-harga-jagung?page=all>
11. <https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/592659/republik-lele-kediri-jadi-model-bisnis-budidaya-berkelanjutan>
12. <https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/592659/republik-lele-kediri-jadi-model-bisnis-budidaya-berkelanjutan>
13. <https://jakartautara.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1763322818/republik-lele-kediri-jadi-model-bisnis-budidaya-catfish-berkelanjutan>
14. <https://suarapemerintah.id/2021/12/kkp-republik-lele-kediri-jadi-model-bisnis-budidaya-lele-berkelanjutan/>
15. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36600/t/KLHK+Harus+Wujudkan+Pengelolaan+Sampah+yang+Kolaboratif+>
16. <https://www.realitarakyat.com/2021/12/dpr-minta-klhk-jadikan-tpa-sekoto-sebagai-pilot-project/>
17. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36610> (Perubahan aturan dinilai sulitkan Bulog jalankan fungsi publik)
18. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36611> (Legislator Prihatin Bulog Harus Akses Perbankan dengan Bunga Komersial)
19. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36586> (Komisi IV Usulkan Telur Jadi Menu Bansos Sesuai Kearifan Lokal)

## MITRA PENDAMPING

KEMENTERIAN PERTANIAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan Litbang Pertanian : <b>Dr. Ir Fadry Djufry, M.Si</b></li> <li>2. Direktur Perlindungan Ditjen Perkebunan : <b>Ardi Praptono, SP.M.Agr</b></li> <li>3. Direktur Irigasi Ditjen PSP : <b>Ir Rahmanto, M.Sc</b></li> <li>4. Direktur Pakan Ditjen PKH : <b>drh. Agus Sunanto, MP</b></li> <li>5. Direktur Buah dan Florikultura Ditjen Hortikultura: <b>dr Liferdi, SP, M.Si</b></li> <li>6. Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan : <b>Ir Enie Tauruslina Amarulloh, MP</b></li> </ol>
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dirjen Perikanan Budidaya: <b>Dr. Tb. Haeru Rayahu, M.Sc</b></li> <li>2. Direktur Pakan &amp; Obat Ikan: <b>Ir. Ujang Komaruddin, M.Sc</b></li> <li>3. Plt Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo: <b>Manijo, S.St.Pi</b></li> </ol>
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dirjen Pengelolaan Sambah, Limbah, dan B3: <b>Rosa Vivien Ratnawati</b></li> <li>2. Direktur Pengelolaan Sampah: <b>Novrizal Tahar</b></li> <li>3. Kasubdit SSDU: <b>Ari Sugasri</b></li> </ol>
PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Keuangan dan Umum PT Petrokimia Gresik: <b>Budi Wahyu Soesilo</b></li> </ol>
PERUM BULOG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur <i>Supply Chain</i> dan Pelayanan Publik: <b>Mokhamad Suyamto</b></li> </ol>

## LAMPIRAN DOKUMENTASI

